

EVALUASI TUGAS KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DIDESA PULAU BARU KECEMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Boby Harviles

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : Bobyharviles11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada desa pulau baru Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang berlangsung mulai bulan November 2019 sampai bulan Maret 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tugas Kepala Desa sebagai Pelaksanaan Pembangunan dituntut agar mampu menjalankan perannya dalam pembinaan masyarakat, mampu melaksanakan pembinaan perekonomian pedesaan, mampu memelihara ketentraman, ketertiban, mampu melaksanakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta mampu menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD. Data di ambil dari aparat Desa sebanyak 6 responden dan masyarakat 20 responden yang dilakukan melalui wawancara, dan penyebaran angket, kemudian diolah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan, kemudian dihubungkan dengan teori yang menunjang pembahasan, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari penjelasan tersebut.

Kata Kunci: Tugas Kepala Desa, Pembangunan

Abstract

This research is conducted at new island country side of Middle district Pestle of Sub-Province Pestle of Singingi that goes on start november 2019 until March month 2020. Intention of this research is to know Duty Lead Countryside In Development in New Countryside Island of District Of Middle Pestle Sub-Province Pestle of Singingi. Duty Lead Countryside as Execution of Development claimed to be can run its role in construction of society, can execute construction of rural economics, can look after peace, orderliness, can execute deliberation in decision making, and also can compile and design regulation of countryside in the affirmative BPD. Data in taking away from Countryside government officer counted 6 society and responder 20 responder which is through interview, and spreading of enquette, is later then processed with method of deskriptif qualitative that is obtained data as things have panned out, is later;then attributed to theory which supporting solution, hereinafter writer take conclusions of clarification.

Keyword: Duty Lead Countryside, Development

1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sehingga merupakan badan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat. Reformasi dan otonomi daerah adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun Desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dasar tugas Desa atau Kepala Desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 mengatakan kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas diamanatkan kepada Kepala Desa untuk menyelenggarakan pembangunan Desa, tentunya dengan segala kapasitas yang diberikan kepadanya salah satunya dengan menggunakan partisipasi masyarakat.

Kepala Desa sebagai pembuat kebijakan harus mampu mengayomi masyarakat dengan bersikap adil dan bijaksana untuk mengajak masyarakat turut berpartisipasi di dalam pembangunan, Kepala Desa juga harus mampu melihat mana yang terlebih dahulu harus di prioritaskan. Indikator pembangunan apabila dikatakan berhasil harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecakupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Sumber: Dunn (Riant Nugroho,2009:536)

Di Desa Pulau Baru terdapat pembagian wilayah dimana Desa Pulau Baru terbagi menjadi tiga (3) Dusun yaitu Tanah teban, Tanjung baru, Kampung Tengah, desa Pulau Baru berada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi luas wilayah 912 ha dengan jumlah penduduk 1.550 jiwa, batas wilayah sebelah Utara Kecamatan Sentajo Raya dan Desa Koto tuo Kecamatan Kuantan Tengah, sebelah Selatan PT. Duta Palma Nusantara, sebelah Timur Desa Titian Modang Kec. Kuantan Tengah, sebelah Barat Desa Seberang Taluk Hilir Kec. Kuantan Tengah.

Untuk melaksanakan fungsinya dimana Kepala Desa dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pembangunan karena dialah penggerak, penggerak dan penyelenggara pelaksanaan pembangunan di Desanya. Melaksanakan pembangunan secara baik dan merata bukanlah perkara mudah, tidak jarang Kepala Desa dihadapkan kepada kendala-kendala dan kegagalan dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Perencanaan yang dibuat oleh Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya, beberapa perencanaan pembangunan sudah ada tapi tidak tereliasasi contohnya pembangunan jalan Desa, pembangunan bidang olahraga, perbaikan jalan Desa, dan pembangunan jembatan Desa. Seharusnya dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan terstruktur bisa memacu kemampuan untuk bisa meningkatkan kualitas pembangunan di Desa Pulau Baru ini. Dan dengan adanya dana Desa sekarang ini, hal ini seharusnya menjadikan Desa lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera.

Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi riil sementara Aparat Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini, menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kemampuan kepala Desa Pulau Baru dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan.

Belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi secara baik sebagaimana tersebut diatas, maka hal itu terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama faktor kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara yang belum optimal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.

Pada tahun 2008 Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, telah melaksanakan Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, kajian ini telah menghasilkan cetak biru (blueprint) yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah (problem solving) penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyusun modul-modul peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Lebih lanjut modul-modul tersebut merupakan hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu Perencanaan & Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, Kepemimpinan Kepala Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam. Oleh karena itulah penulis mengajukan judul proposal penelitian “Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian ini Untuk mengetahui tugas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori/konsep Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa Belanda, yakni *Administratie* yang berarti kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam pengertian luas dapat ditinjau dari sudut proses, fungsi, dan dari sudut kepranataan (institutional). Ditinjau dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan, pengawasan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas, administrasi berarti keseluruhan tindak (aktivitas) yang mau atau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau sekelompok orang yang kedudukan sebagai administrator atau manajemen puncak suatu organisasi usaha sedangkan administrasi dari sudut kepranataan atau institusi, kelompok orang yang secara tertentu melakukan aktivitas-aktivitas di dalam organisasi.

Menurut Siagian dalam bukunya Anggara (2012:21), menyebutkan: “Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”

Berdasarkan pendapat diatas maka disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk bisa mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Pliffner dalam bukunya Anggara (2012:21) menyebutkan: “Administrasi dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan penjurusan sumber-sumber yang diinginkan”

2.2 Teori/konsep Negara

Manusia sejak dahulu kala selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok (zoon politicon). Dalam kelompok manusia itulah mereka berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya mencari makan, melawan bahaya dan bencana serta melanjutkan keturunannya. Mereka berinteraksi, mengadakan hubungan sosial. Untuk mempertahankan hak mereka untuk dapat hidup di tempat tinggal tertentu yang mereka anggap baik untuk sumber penghidupan, diperlukan seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan mengatur dan memimpin kelompoknya. Kepada pemimpin kelompok inilah diberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan kelompok manusia tadi diharuskan menaati peraturan-peraturan perintah pemimpinnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Negara sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara juga diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

2.3 Teori/konsep Administrasi Negara

Administrasi negara atau administrasi publik yaitu serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur negara atau pemerintah untuk tercapainya tujuan negara dengan efisien. Administrasi publik (public administration) atau Administrasi Negara yakni suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang mencakup lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif dan juga seluruh hal yang berhubungan dengan publik yang cakupannya kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Sederhananya, definisi administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini meliputi tentang birokrasi; penyusunan, pengimplementasian dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan, pemerintahan daerah serta good governance.

Pengertian administrasi negara menurut John M.Pfifner dan Robert V.Presthus(2009:31) adalah:

Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Pengertian administrasi negara menurut George J. Gordon adalah administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan.

2.4 Teori/ konsep Evaluasi

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:272) evaluasi berarti penilaian. Sedangkan menurut Wirawan (2012:7) evaluasi adalah: Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut”.

Menurut buku Metode Riset Evaluasi, Hadi (2011:13) mendefinisikan evaluasi sebagai “proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator”. Selanjutnya dalam buku yang sama Hadi (2011: 13-14) memaparkan riset evaluasi sebagai: Aplikasi sistematis dari prosedur riset sosial untuk menaksir atau menilai konseptualisasi dan desain, implementasi serta utilitas program intervensi sosial. Menurut definisi ini, riset evaluasi melibatkan pemakaian metodologi riset sosial untuk memberikan putusan atau penilaian dan untuk meningkatkan perencanaan, pemantauan, efektivitas, dan efisiensi suatu program sosial. Program sosial tersebut beragam diantaranya ialah, program kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan program layanan manusia lainnya.

Pendapat selanjutnya muncul dari Husni (2010: 971), yang menyatakan bahwa “evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil penilaian atas permasalahan yang ditemukan”

2.4.1 Prosedur Evaluasi

Menurut Umar (2005, hal. 78), evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Berikut penjelasan salah satu tahapan evaluasi yang umumnya digunakan :

- 1) Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam dunia bisnis, apa saja yang dapat dievaluasi, mengacu pada program kerja perusahaan. Dalam program kerja perusahaan banyak terdapat aspek-aspek yang dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi biasanya yang di prioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-succeess factor*–nya.
- 2) Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, sebaiknya ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- 3) Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- 4) Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan *gap*. Besar *gap* akan sesuai dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- 5) Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis dan diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan.
- 6) Tindak lanjut evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen. Oleh karena itu, hasil evaluasi hendaknya dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi masalah manajemen baik di tingkat strategi maupun di tingkat implementasi strategi.

2.5 Teori Manajemen

Secara etimologis, kata *manajemen* berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata

manage itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan (Samsudin, 2006: 15).

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 3). Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) (Handoko, 1999: 8).

Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. (Abdul Choliq, 2011: 2)

Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Abdul Choliq, 2011:3)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2.5.1 Fungsi-Fungsi Manajemen

Definisi manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber material dan finansial. Bagaimana manajer mengoptimasi pemanfaatan sumber-sumber, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi *output*, maka manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

Sebagaimana disebutkan oleh Daft, manajemen mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Dari fungsi dasar manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan “tercapai” atau “belum Tercapai” (Abdul Choliq, 2011: 36).

Menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi manajemen adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah *Planning, Organizing, Motivating dan Controlling*. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen yang lain tentang fungsi-fungsi manajemen. Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik (Hasibuan, 2005: 3-4). Persamaan tersebut tampak pada beberapa fungsi manajemen dakwah sebagai berikut.

a. Perencanaan.

Menurut G.R. Terry, *Planning* atau perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas

yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Purwanto, 2006: 45). Sebelum manajer dapat mengorganisasikan, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa (Handoko, 1999: 79)

b. Pengorganisasian

Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. Pengorganisasian (*organizing*) adalah 1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perancangan dan pengembangan suatu organisasi kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan., 3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan (Handoko, 1999: 24). G.R. Terry berpendapat bahwa pengorganisasian adalah: “Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Hasibuan, 2001: 23).”

c. Penggerakkan

Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi-bagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan benar-benar tercapai (Shaleh, 1977: 101). Penggerakkan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian (Purwanto, 2006: 58).

d. Pengawasan

Fungsi keempat dari seorang pemimpin adalah pengawasan. Fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya kegiatan atau perusahaan kearah pulau cita-cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan (Manullang, 1982: 171). Menurut G.R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar (Purwanto, 2006: 67). Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana (Manullang, 1982: 174). Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya

- 1) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar
- 2) tepat waktu
- 3) dengan biaya yang efektif,

- 4) tepat akurat, dan
- 5) dapat diterima oleh yang bersangkutan.

Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan (Handoko, 1999: 373)

2.6 Pengertian Pembangunan & Teori Pembangunan

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya. (Fakih 2001:10)

Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. (Katz “ Dalam Yuwono, 2001:47”) Pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik. (Effendi 2002:2)

Salah satu figur kunci dalam teori pembangunan adalah Rostow. Ia memiliki posisi penting di sejumlah universitas ternama dan pemerintahan Amerika Serikat. Rostow mendesain lembaga bantuan internasional Amerika yang kini dikenal dengan nama USAID (U.S. Agency for International Development). Pengaruhnya di bidang akademik masih terasa sampai hari ini.

Dalam bukunya “The Stages of Economic Growth” (1960), Rostow memaparkan pembangunan negara dari tradisional menuju modern melalui lima tahap.

Lima tahap pembangunan menurut W. W. Rostow:

1. Tahap pertama, negara yang kondisi masyarakatnya masih tradisional. Karakteristik utama masyarakat tradisional adalah ekonomi subsisten, ikatan kekeluargaan masih kuat dan teknologi yang berkembang belum menyentuh mesin.
2. Tahap kedua, negara yang kondisi masyarakatnya siap untuk lepas landas. Karakteristik utama masyarakat yang siap lepas landas adalah berkembangnya sistem agrikultur dan penggunaan teknologi mesin untuk bekerja. Pada tahap ini muncul sistem perbankan dan investasi. Nilai-nilai tradisional masih eksis namun ada indikasi perubahan pada nilai-nilai modern.
3. Tahap ketiga, negara yang kondisi masyarakatnya lepas landas. Karakteristik utama tahap ini, elemen tradisional tenggelam oleh modernisasi. Urbanisasi terjadi di kota-kota besar, pertanian mengalami komersialisasi, dan industrialisasi berkembang pesat. Grafik pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
4. Tahap keempat, negara yang kondisi masyarakatnya menuju kedewasaan. Karakteristik utama masyarakat yang menuju dewasa meliputi pertumbuhan ekonomi yang secara umum konsisten meskipun ada fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi telah memasuki pasar internasional, diindikasikan dari nilai investasi yang mampu bersaing secara global. Aplikasi teknologi meningkat dan terus mengalami kemajuan seiring teknologi baru ditemukan. Kedewasaan diindikasikan ketika produksi ekonomi tidak terbatas pada produk industri sebagaimana pada tahap lepas landas.
5. Tahap kelima, negara yang kondisi masyarakatnya menuju masyarakat konsumsi (the age of high mass consumption). Karakteristik utama masyarakat ini berada pada peralihan dari produksi barang ke produksi jasa. Masyarakat telah mencukupi kebutuhan dasarnya dan menghabiskan konsumsi untuk jaminan dan kesejahteraan sosial. Komposisi pekerjaan didominasi oleh pekerja perkotaan, sektor jasa menjadi

sektor dengan keterampilan tinggi, dan pendapatan per kapita tiap orang diatas rata-rata. Rostow berpendapat, Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang dapat diaplikasikan di negara-negara berkembang

2.7 Teori/konsep Administrasi Pembangunan

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan. yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (siagian, 2009:4).

The liang gie (dalam pasalong, 2011:3) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pasalong (2011:3) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Pembangunan menurut Siagian (2009:4) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (nation-building). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa. Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto, 2006:4). dikenal dengan administrasi pembangunan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan

Menurut Husaini Usman (2014:129), kata Deskriptif berasal dari bahasa inggris, descriptive, yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Sedangkan menurut Arikunto (2010:278), kualitatif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dan hasil wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksa dengan baik. hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dan wawancara yang di lakukan oleh Penulis yang ditemukan banyak yang telah merasakan manfaat dari Pembangunan di Desa. Dari hasil wawancara tersebut Penulis dapat menyimpulkan pihak Desa sudah melaksanakan Tugasnya dengan Baik karena telah melaksanakan dengan prosedur-prosedur pembangunan dan masyarakat telah merasakan manfaat akan pembangunan di Desa.

Analisa data Yaitu pengumpulan data yang di lakukan oleh peneliti berdasarkan indikator dan pertanyaan dari hasil wawancara yang di lakukan mengenai Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

Indikator Efektivitas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, Masyarakat Desa Pulau Baru Kopah, Bahwa tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan Pembangunan dalam indikator efektivitas disini maksudnya ialah dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas merupakan hubungan output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh dari responden dengan Kepala Desa dan Wildanis selaku masyarakat menyatakan bahwa tentang tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan tahap perencanaan pemerintahan Desa dengan BPD, lalu bermusyawarah dengan masyarkat sebelum melaksanakan pembangunan, terakhir baru realisasi pembangunan yang telah disepakati dengan masyarakat dan sesuai dengan anggaran yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam pelaksanaan pembangunan Desa telah sesuai dengan prosedur pembangunan Desa. Yang mana fungsi Kepala Desa dalam administrator Pembangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa pasal 11 menjelaskan bahwasanya kepala Desa mempunyai fungsi yaitu, menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggara urusan pemerintahan desa, menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat, dan menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari hasil wawancara penulis dengan Responden dapat diketahui bahwa dalam pelayanan Pembangunan dalam setiap aspek apakah sudah merata atau tidaknya di Desa Pulau Baru itu sudah baik, karena pemerintahan Desa telah melaksanakan Pembangunan dalam setiap aspeknya baik fisik maupun pembangunan non fisiknya.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa itu meliputi aspek fisik dimana dalam setiap tahunnya di Desa Pulau Baru melaksanakan pembangunan Desa secara fisik seperti contoh pembangunan jalan dan jembatan yang akan menunjang perekonomian di Desa dimana pembangunan yang dilaksanakan itu membuka akses masyarakat untuk mata

pencahriannya baik itu berkebun atau bertani di sawah. Begitu halnya disegi non fisik di Desa Pulau Baru telah berjalan dengan baik pula yang mana di Desa Pulau Baru terdapat SD dan PAUD/TK untuk membangun sumber daya manusianya. Dan pembangunan sarana pra sarana nya telah ada berupa gedung pembelajaran yang menunjang peningkatan sumber daya manusianya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apakah pelayanan pembangunan sudah merata dalam setiap aspeknya dapat disimpulkan sudah merata, sebab setiap tahunnya pemerintahan Desa terus melaksanakan Pembangunan untuk menunjang perekonomian masyarakat Desa

Indikator Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil itulah yang dinamakan efisiensi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, dan Masyarakat bahwa Efisiensi itu merupakan penghematan baik dari segi kebijakan yang dibuat oleh Pemdes dan penghematan dari segi biaya atau keuangan. Dengan pertanyaan bagaimana usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintahan Desa dalam mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan, sebab masih banyak masyarakat yang belum tau tentang apa-apa yang akan dibangun. Karena sistem atau usaha yang dilakukan oleh pihak Desa dalam mensosialisasikan itu dalam bentuk musyawarah. Dalam musyawarah tersebut masih banyak masyarakat tidak hadir waktu diadakan musyawarah tersebut yang mana sistem penyampaian yang dilakukan oleh Desa masih dengan cara tradisional dengan menggunakan Canang yang terkadang bagi masyarakat yang jauh tidak terjangkau dari penyampaian tersebut.

Dari pernyataan responden diatas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan dalam mensosialisasikan pembangunan masih kurang baik, karena banyak masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah pembangunan tersebut, Dari hasil wawancara penulis dengan responden dapat diketahui bahwa kesulitan yang dihadapi itu masalah pembebasan lahan yang akan dibangun karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat yang akan dirasakan akan pembangunan tersebut dan juga banyak masyarakat yang tidak mau kehilangan tanahnya, dan masalah pembebasan lahan terkendala juga karena yang punya tanah tidak berdomisili di Desa Pulau Baru. Dilihat dari segi administrasinya tidak ada masalah karena sebuah instansi itu sudah mencukupi administrasinya, Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan kurangnya koordinasi Kepala Desa akan pembangunan tersebut terhadap masyarakat Desa, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang manfaat akan pembangunan yang dilaksanakan tersebut

Indikator Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan masyarakat kecukupan dapat dikatakan dengan lengkap atau apa yang dibutuhkan semuanya ada baik input maupun output nya. Dengan pertanyaan bagaimana kecukupan berkas yang ada di instansi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pulau Baru, bahwasanya kecukupan berkas yang ada di instansi dalam pelaksanaan pembangunan sudah mencukupi, karena instansi atau pelaksana pembangunan dalam hal ini Kepala Desa sudah melengkapi baik sarana maupun pra sarana

nya. Akan tetapi pemerintahan Desa seharusnya lebih transparan lagi kepada masyarakat nya terkait dengan berkas-berkas dalam instansi pemerintah.

Dari pernyataan responden diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan berkas sudah baik, karena dalam sebuah instansi telah melengkapi sarana dan prasaranya, dan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk bisa mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik tinggal lagi memberikan arahan kepada masyarakat akan berkas yang ada di pemerintaha Desa dan BPD. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Desa Pulau Baru telah memnuhi kebutuhan pembangunan. Pembangunan yang berlandaskan dengan kebijakan-kebijakan peningkatan sumber daya manusia dengan cara peningkatan pendidikan, keahlian dan keterampilan bagi para pegawai, karyawan, pekerja dan mahasiswa/mahasiswi dalam bidang masing-masing, yang dipersiapkan untuk pengelolaan bidang-bidang atau potensi-potensi kekayaan tertentu. Dengan dimikian maka pembangunan yang diharapkan akan tercapai dengan semaksimal mungkin.

Indikator Perataan

Dari hasil wawancara dengan responden dapat diketahui bahwasanya perataan pembangunan sudah baik, akan tetapi pembangunan di Desa Pulau Baru lebih mementingkan keperluan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari pernyataan responden diatas dapat disimpulkan dalam hal perataan pembangunan di Desa sudah berjalan dengan baik akan tetapi pembangunan di Desa Pulau Baru lebih mementingkan yang dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu. Sebagai Kepala Pemerintahan selaku pelaksana Pembangunan di Desa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal perataan tersebut dengan lebih memntingkan keperluan masyarakat. Karena dengan mendengarkan aspirasi masyarakat akan membantu dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, dan pembangunan akan menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat di Desa Pulau Baru, dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan tentang pembangunan yang akan dilaksanakan sudah cukup baik, Karena pemerintahan Desa tidak mau sendiri mengambil keputusan tentang yang akan dibangun tetapi bersama-sama dengan masyarakat mengambil keputusan pembangunan tersebut, dan juga pemerintahan Desa mau menerima masukan dan saran dari masyarakat lewat forum musyawarah pembangunan Desa. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan dari Kepala Desa terhadap masyarakat akan pelaksanaan pembangunan telah berjalan dengan baik, dengan fungsi Kepala Desa sebagai memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan swadaya, serta menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan baik

Indikator Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, dan masyarakat, bahwa Responsivitas disini adalah tanggapan baik dari pelaksana pembangunan dalam hal ini Kepala Desa serta masyarakat yang menerima manfaat dari pembangunan tersebut, Dari pernyataan responden dapat diketahui bahwa dampak setelah dilaksanakannya pembangunan sangat terasa oleh masyarakat, selain membuka akses atau jalan di Desa pembangunan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dalam hal ini pemerintahan Desa dalam pelaksana pembangunan Desa itu lebih tanggap kepada masyarakat nya sendiri, karena pembangunan yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakatnya, Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas dalam hal dampak yang dirasakan setelah dilaksanakannya pembangunan Desa itu sudah dirasakan akan manfaatnya oleh masyarakat Desa, dalam hal ini pelaksana pembangunan Desa yaitu Kepala Desa telah melaksanakan fungsi Kepala Desa dengan baik kepada masyarakatnya, dapat diketahui bahwasanya sikap Kepala Desa dalam merespon pengaduan masyarakat terhadap Pembangunan sudah cukup baik, karena Kepala Desa terbuka kepada masyarakat dan

mengapresiasi masyarakatnya, akan tetapi masih ada pengaduan dari masyarakat sikap Kepala Desa yang memilih sebelah pihak, Pemerintah yang demokratis tidak akan memilih-milih siapa lawan dan siapa kawan, Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa respon dari pemerintah terhadap pengaduan masyarakat dinilai sudah baik, walau masih ada masyarakat yang masih menganggap pemerintah tidak mau mendengarkan aspirasi dari masyarakat tersebut karena berlawanan ketika pemilihan Kepala Desa, dalam hal ini lebih baik menjalankan fungsinya yang mana pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Indikator Ketepatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD dan masyarakat, ketepatan disini merupakan suatu pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan bermanfaat bagi masyarakat, Dari hasil wawancara dengan responden dapat diketahui dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peran dari masyarakat dalam partisipasi pembangunan sangat dibutuhkan oleh Kepala Pemerintahan, karena dengan bersama-sama masyarakat pembangunan yang dilaksanakan akan lebih ringan dan ikut meningkatkan pembangunan di Desa. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat akan pelaksanaan pembangunan akan mempercepat suatu pembangunan dan meningkatkan akan pembangunan tersebut. Dalam hal ini Kepala Desa telah melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu mampu meningkatkan partisipasi masyarakat akan pembangunan di Desa. dapat disimpulkan dalam hal hasil pembangunan banyak penilaian masyarakat terhadap tugas Kepala Desa sudah baik dalam menjalankan tugasnya di Desa Pulau Baru Kopah. Sebagai lembaga dalam hal ini pelaksana pembangunan di Desa diharapkan Kepala Desa mampu meningkatkan lagi dan memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat akan pelaksanaan pembangunan Desa. Karena dengan meningkatkan kinerjanya pembangunan di Desa akan menjadi lebih baik lagi.

Selanjutnya Analisa Peneliti terkait judul penelitian yaitu Evaluasi Tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sudah cukup baik dikarenakan Kepala Desa sudah melaksanakan tugasnya secara baik yaitu dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang tugas Kepala Desa dalam melaksanakan Pembangunan Desa. Dalam penelitian ini Kepala Desa ketika melaksanakan tugasnya dalam pembangunan tidak hanya melibatkan Pemerintahan Desa dan BPD akan tetapi melibatkan masyarakat Desa Pulau Baru dalam merancang dan menentukan pembangunan Desa.

Sebagai contoh untuk membuat atau menentukan pembangunan selanjutnya Pemerintahan Desa dan BPD dalam hal ini mengajak masyarakat bermusyawarah bersama-sama dalam menentukan pembangunan selanjutnya.

Selain itu Kepala Desa dalam melaksanakan Pembangunan Desa yang telah dilaksanakan pemerintahan Desa telah melengkapi seluruh dokumen-dokumen baik dokumen-dokumen administrasi maupun yang lain yang menunjang semua tugas Kepala Desa. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dari masyarakat Pulau Baru. Selain itu Kepala Desa selaku Pelaksana pembangunan Desa telah terjalin komunikasi dengan baik dengan Mitra Kerjanya yaitu BPD dan juga dengan masyarakat Desa

Sehingga dari jawaban informan pada penjelasan di atas dapat dilihat bahwa jawaban dari indikator dalam Evaluasi Tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dinilai cukup baik dengan jumlah 6 indikator dinilai cukup baik. Dengan demikian dinyatakan Evaluasi Tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik dan terus tingkatkan lagi agar kualitas Pembangunan Desa dan Perekonomian Desa dapat meningkat

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terhadap Kerangka Pemikiran Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Pembangunan Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksa dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dan wawancara yang di lakukan oleh Penulis yang ditemukan banyak yang telah merasakan manfaat dari Pembangunan di Desa. Dari hasil wawancara tersebut Penulis dapat menyimpulkan pihak Desa sudah melaksanakan Tugasnya dengan Baik karena telah melaksanakan dengan prosedur-prosedur pembangunan dan masyarakat telah merasakan manfaat akan pembangunan di Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada henti kepada kedua orang tua tercinta. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang dan pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat menjalani hidup dan terima kasih kepada saudaraku tersayang yang juga telah memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani study, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan selaku dosen pembimbing I, Bapak Bapak Emilia Emharis, S.Sos, M.Si Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju redefenisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia. Bandung
- Ahdiyana, M. 2010. *Dimensi Organizational Citizenship Behavior (OCB) dalam kinerja organisasi*, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas, 2016. *Manajemen sumber daya manusia*. Alfabeta : Bandung
- Hasibuan, melayu, 2012. *Manajemen sumber daya manusia*. PT Bumi Aksara Jakarta
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika administrasi Negara*. PT Raja Grafindo persada, Jakarta
- Robbins, S.P. 2016. *Perilaku organisasi* edisi 16. Jakarata: Salemba Empat
- Sawe, Jamaluddin. 1996. *Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan*. APDN Press.
- Sondang P, Siagian. 2001. *Manajemen sumber daya manusia*, Binapura Aksar Jakarta
- Sondang P, Siagian. 2002. *Manajemen sumber daya manusia*, Binapura Aksar Jakarta
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-asas Manajemen*. PT Refika Aditama : Bandung

- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. alfabeta : Bandung
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. alfabeta : Bandung
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. alfabeta : Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar ilmu pemerintahan*, PT Refika Aditama, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*, PT Refika Aditama, Bandung
- Terry, George dan Leslie W, Rue. 2010. *Dasar-dasar manajeme*. Cetakan kesebelas. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu administrasi public, kontemporer*, Kencana. Jakarta
- Thoha, Miftah, 2011. *Perilaku Organisasi, konsep dasar dan aplikasinya* Rajawali Pers. Jakarta
- Triana, Cepi. 2015. *Perilaku organisasi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Widjaja, 1993. *Komunikasi dan hubungan masyarakat*. Bumi Aksara. Jakarta

Sumber lain:

Buku Panduan Skripsi UNIKS

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pasal 11

Kantor Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi